UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

BAB III

TINJAUAN PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat PLN

Tenaga Listrik mulai tersedia untuk masyarakat Indonesia sejak tahun 1898 sampai sebelum pecah Perang Dunia ke-II tahun 1942, perkembangan pengelola tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda bersama dengan perusahaan-perusahaan listrik negara separti : **ANIEM** (*Algemeen Netherlands Indische Electrictien Maatschapy*), **OGEM** (Overzeesche Gas Electrictien Maatsc4apy) dan **GEBEO** (*Gas en Electrictien Maatschapy Bandung en Omgeeving*).

Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), pengelola tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Sedangkan pada masa revolusi fisik setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1950 di daerah yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia pengelolaan tenaga listrik dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas, sedangkan di daerah yang diduduki kembali oleh Belanda seperti keadaan sebelum Perang Dunia ke-II. Jawatan Listrik dan Gas didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1/S.D./1945 tanggal **27 Oktober 1945** dan tanggal tersebut sebagai **"Hari Listrik Nasional".**

Pada tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diganti menjadi Jawatan Tenaga yang membawahi antara lain Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL).

Pada tanggal 27 Desember 1958, dikeluarkan Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Mulai saat itu seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

Jawatan Tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara melalui Surat Keputusan Mentri Perusahaan Umum dan Tenaga No. P.25/45/17 tanggal 23 September 1958. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.67 tahun 1961, dibentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola semua Perusahaan Listrik dan Gas dalam suatu Wadah organisasi yang berbadan hukum. Namun kemudian pada tanggal 13 Mei 1965 dibentuk Perusahaan Listrik Negara(PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Selanjutnya dalam perkembangan PLN diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 yang menegaskan bahwa status pln adalah suatu Perusahaan Umum (PERUM).

Pada tahun 1985 ditetapkan Undang-undang No. 15 tentang Ketenagalistrikan yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 tahun 1989. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan bahwa PLN merupakan salah satu Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan serta memungkinkan swasta untuk turut dalam pengusaan tenaga listrik bagi Kepentingan Umum.

Kemudian sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 yang menjadi dasar hukum pengelola

Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Dan selanjutnya sesuai dengan peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994 tanggal 16 juni 1994 dan Akta Notaris No. 169 tanggal 30 Juli 1994, PLN berubah status dari PERUM menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama **PT.PLN (PERSERO).**

PT. PLN (PERSERO) SEKTOR BOGOR

Keberadaan PLN Sektor Bogor sejak zaman Kolonial Belanda bernama S'Lands Waterkrach Bedrijfft (LWB). Kemudian berawal dari perubahan PENUPETEL menjadi Daerah Pembangkitan Bogor, untuk selanjutnya berkembang menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Sektor Bogor yang merupakan unit dari PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Barat (PLN KJB) di Jakarta yang berada dibawah PLN Pusat dan bernaung dibawah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pada statusnya sebagai Perusahaan Umum, struktur organisasi PLN Sektor Bogor pada mulanya terdiri dari 3 Bagian (Bagian Teknik, Bagian Operasi dan Bagian Tata Usaha), serta membawahi 5 Unit Tranmisi dan 2 Unit PLTA (PLTA Kracak dan PLTA Ubrug). Pada tahun 1991 struktur PLN Sektor Bogor mengalami perubahan dengan penambahan 1 (satu) Unit Tranmisi serta dilimpahkannya kedua Unit PLTA menjadi dibawah pengawasan dan tanggung jawab PLN Sektor Saguling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pengawasan Parasional Jaringan Tranmisi dan Gardu Induk pada Sektor Penyaluran.

Setelah perubahan status dari PERUM menjadi PERSERO, PLN melakukan restrukturisasi dimana terjadi pemisahan antara fungsi Pembangkitan

dan fungsi Penyaluran pada sistem Jawa Bali. Fungsi Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan II (PT. PLN PJB I dan PJB II), sedangkan fungsi Penyaluran/Tranmisi digabungkan dengan PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) menjadi PT. PLN (PERSERO) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali atau disingkat PT.PLN (PERSERO) P3B.

Pembentukan PT. PLN (PERSERO) P3B ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 093.K/023/DIR/1995 tanggal 02 oktober 1995 yang mempunyai tujuan dan lapangan usaha yaitu mengelola operasi sistem, memelihara dan mengembangkan sistem operasi dan sarana penyaluran, mengelola energi dan mengelola pengusahaan jasa telekomunikasi masing-masing sesuai kebijakan Perseroan secara komersil sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

Dengan adanya Restrukturisasi tersebut, maka sekarang PLN Sektor Bogor berada dalam wilayah kerja dan merupakan salah satu Unit Sektor Penyaluran dari PT.PLN (PERSERO) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

Adapun Struktur PLN Sektor Bogor yang baru sesuai dengan perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kantor Sektor Bogor terdiri :
   - 1.1 Bagian Enjinering Penyaluran (sebelumnya bernama BagianTeknik).
   - 1.2 Bagian Pengusahaan Penyaluran (sebelumnya bernama Bagian Operasi)
   - 1.3 Bagian Tata Usaha.

2. Tranmisi dan Gardu Induk (sebelumnya bernama Unit Tranmisi) terdiri dari :

2.1 Tranmisi dan Gardu Induk Serang, berkedudukan di serang

2.2 Tranmisi dan Gardu Induk Rangkasbitung, berkedudukan di Rangkasbitung

2.3 Tranmisi dan Gardu Induk Kedung Badak, berkedudukan di Bogor

2.4 Tranmisi dan Gardu Induk Bogor Baru, berkedudukan di Bogor

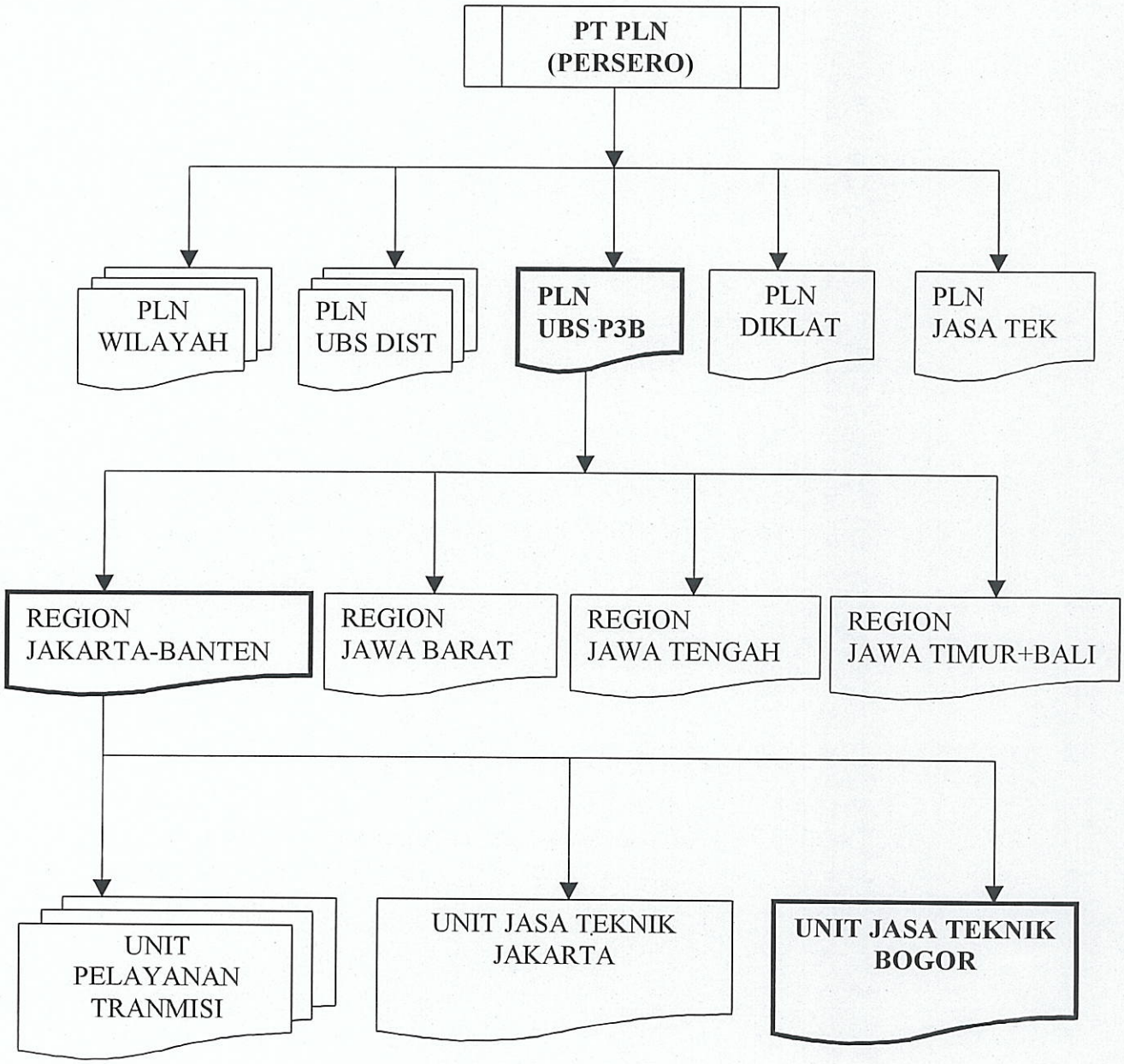
2.5 Tranmisi dan Gardu Induk Lembursitu, berkedudukan di Sukabumi

3.2 Struktur Organisasi.

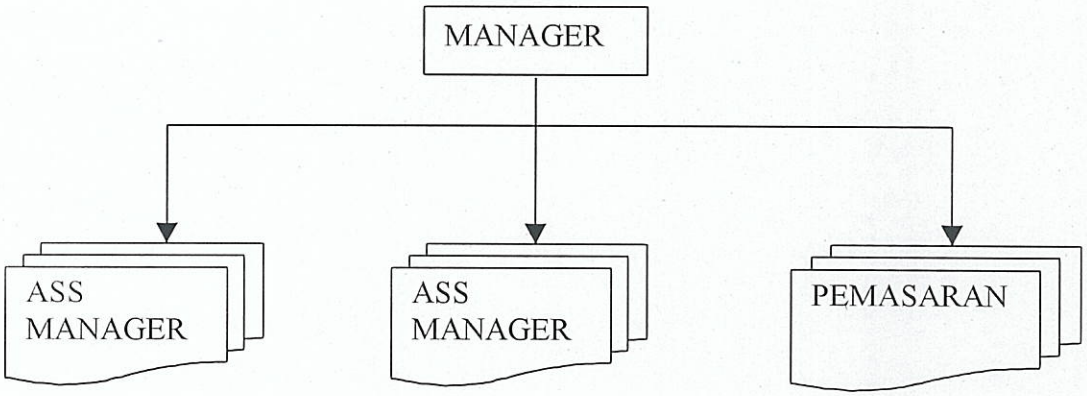
Alamat Jalan Jendral Sudirman No. 5 Bogor tanggal diberi izin 02 Nopember 2000 Pemegang Saham adalah Pemerintah/BUMN. Organisasi : Manager, Asisten Manager Tehnik membawahi Jasa Pemeliharaan Sarana Lur. – Jasa Instalasi Scada Tel. – Jasa Konsultan dan Kontruksi. Asisten Manager Administrasi dan Keuangan membawahi Fasilita Kantor, Adm Kepegawaian, Anggaran, Keuangan dan Akuntasi dan Humas, Pemasaran.

UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIKOM

3.3 H Posisi PLN UJT BOGOR



3.4 Bagan Struktur Organisasi



Jasa Pemeliharaan

Sarana Lur

- Jasa Instalasi Scada Tel
- Jasa Konsultan Dan Kontruksi

- Fasilitas Kantor
- Adm & kepega waian
- Anggaran
- Keuangan & akuntansi

UNIKOM

3.5 Unit Jasa Teknik Bogor

3.5.1 Fasilitas

1. SDM

a) Perencanaan Instalasi Gardu-Induk dan Transmisi

b) Pelaksanaan Operasi (Operator) Gardu-Induk dan Transmisi Serta Gardu-Induk mobile

c) Pelaksanaan Pemeliharaan : Ba y Transmisi, Transformator,cubicle 20kv dan System DC Gardu-Induk

d) Pelaksana pemeliharaan proteksi utama dan cadangan pada instalasi penyaluran tegangan rendah sampaii dengan tegangan extra tinggi

e) Perencanaan dan pelaksanaan Komisioning dan pengujian instalasi tegangan rendah sampai tegangan extra tinggi.

2. KANTOR

A. Luas Tanah danLuas Kantor : 1973 M2

Luas Bangunan : 1653,60 M2

- Luas Atas : 811,60 M2

- Lantai Bawah : 842 M2

B. Jumlah Tenaga kerja

1. Manager : 1 Orang

2. Ass. Maqnager : 2 Orang

3 Bagian Teknik : 39 Orang

4. Bagian Administrasi : 35 Orang

3. PERALATAN KERJA TEKNIK

a) Alat Uji Tegangan Tinggi 0 – 400 Kv DC

b) Alat Uji Tan – Delta

c) Alat Uji Analisis Gas Trafo

d) Alat Uji Sistem Proteksi, Utama dan Cadangan

e) Alat Uji Sistem Cross Bonding Kabel Tanah

f) Alat Uji Purity (Persentase SF.6), Dew Point SF.6

g) Reclaimer SF.6 – 1000 L (Tanpa minyak pelumas)

h) Mesin Filter Minyak Trafo : 8.000 Liter/Jam

i) Alat Uji Tahanan Isolasi

j) Alat Uji Tahanan Pentanahan Kontak

k) Alat Uji Medan Listrik

l) Alat Uji Kapasitas Baterai

m) Alat Pencari Gangguan Kabel Tanah Tegangan Tinggi

n) Alat Uji Minyak Trafo

o) Infrared Thermovision

p) Alat Uji Partial Discharge

q) Jembatan Weatstone

r) Murray loop

s) Kalibrasi Meter – meter

t) Injeksi Sekunder

u) Mesin Vacum Kabel/ / Trafo

v) Alat Pengisi Gas SF.6

4. PERALATAN KERJA UMUM

a) Truck > 10 Ton (Hino, Toyota)

b) Head-Crane, 0 - 19 Meter, 10 Ton

c) Truck Crane, 5 Ton

3.5.2 Jasa Teknik & Properti

a) Jasa Operasi dan Pemeliharan Peralatan Listrik Tegangan Rendah sampai Tegangan Extra Tinggi

b) Jasa Pengujian dan Komisioning Peralatan Listrik Tegangan Rendah sampai Tegangan Extra Tinggi

c) Jasa Pembangunan / Pemasangan Instalasi Listrik / Gardu Induk dan Tranmisi Tegangan Rendah sampai Teganan Extra Tinggi

d) Jasa Engineering Instalasi Penyaluran Tenaga Listrik Rendah sampai Tegangan Extra Tinggi

e) Jasa Melaksanakan Operasi Instalasi Tenaga Listrik Rendah sampai Tegangan Extra Tinggi

f) Jasa Konsultasi dan Pelatihan Proteksi, wiring dan Power Quality yang meliputi Konsultasi Teknik Peralatan Instalasi Tenaga Listrik Rendah sampai Tegangan Extra Tinggi, Pelatihan yang berkaitan dengan Operasi Sistem Ketenaga-listrikan serta Keselamatan Kerja

g) Jasa Menyewakan Peralatan Kerja yang meliputi Peralatan "Hot- -Line" Maintenance dan "Off - -Line" Maintenance dan Property (Mess dan Tanah garapan)

3.5.3 Produk

A. Mengoperasikan Instalasi Gardu-Induk 500, 150, 70 & 20 kV

B. Memelihara Peralatan Gardu-Induk Konvensional dan Gardu-Induk SF.6, yang terdiri dari :

   a) Bay 500,150,dan70 kV (Pmt,CT,VT,Arrester,Isolator dan Kompartemen SF.60)

   b) Transformator 500,150,70 dan 20 kV

   c) Cubikel/sel 20 kV Distribusi

   d) Gardu-Induk mobile

   e) Baterai dan Instalasi Sumber DC, keperluan Proteksi dan Komunikasi

   f) Kabel Bawah Tanah 500,150,70 dan 20 kV

   g) Jaringan Udara Tegangan Tinggi 500,150,70 dan 20 kv dan Saluran Udara Tegangan Rendah

C. Memelihara Sistem Proteksi Utama dan Cadangan Sistem Penyaluran Tegangan Tinggi 500,150,70 dan 20 kV serta Tegangan Rendah

D. Memelihara Instalasi Scada dan Telakomunikasi

E. Melaksanakan pengujian dan komoisioning peralatan Instalasi Tegangan Tinggi : T/l bay, Transformator bay, Kubikel serta Tegangan Rendah

F. Melaksanakan pemasangan instalasi Sistem Proteksi, wiring instalasi dan Power Quality

G. Melaksanakan Pengujian dan Komisioning peralatan Instalasi Tegangan Tinggi : T/L bay, Transformotor bay, Kub ikel serta Intalasi Tegangan Rendah

3.5.4 Ciri Unit Jasa Teknik Bogor

A. Struktural merupakan Unit dibawah PT PLN (Prsero) UBS-p3B Region Jakarta-Banten

B. Wilayah Kerja daerah Bogor-sSerang-Cilegon, Banten dan sekitarnya

C. SDM Profesional dalam Bidang :

a) Operasi Sistem Tenaga Listrik

b) Pemeliharan Gardu-Induk dan Janringan Transmisi

c) Rancang Bangun Instalasi Gardu –Induk dan Jaringan Transmisi

d) Pelatian Operasi dan Pemeliharaan Peralatan Listrik

e) Konsultasi dan Pelatihan Sistem Proteksi, wiring instalasi serta Power Quality

3.6 Aktvitas Kerja Paktek

Aktivitas kerja praktek yang penulis lakukan di PT PLN (Persero) Region Jakarta dan Banten Unit Jasa Teknik (UJT) Bogor, Penulis mengikuti jadwal yang berlaku pada jasa dan kontruksi yaitu setiap hari senin s/d jum'at (sabtu libur) masuk jam 07:30 s/d 17:00 (istirahat jam 11:30 s/d 12:30)

3.7 Permasalahan Dalam Kerja Praktek

Masalah atau kesulitan yang senantiasa muncul dalam pekerjaan yang akan berpengaruh pada kineja pegawai yang akan dihadapi dapat berupa tantangan jangka pendek ataupun jangka panjang yang mencakup antara lain :

a). Kompleksitas Kerja (kerumitan kerja) : Kerumitan kerja yang sering terjadi karena kurangnya efisiensi kerja yang banyak terjadi yang disebabkan oleh faktor kekurangan tenaga kerja.

b). Posedur Kerja (tata cara dalam bekerja/ aturan dasar kerja) : Kurangnya pemahaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga melanggar tata cara pengerjaan suatu pekerjaan.

c). Masalah Teknologi (kurang sumber daya).:Kurangnya sumber daya manusia maupun teknologi yang digunakan tidak memadai karena disebakan oleh kurangnya perawatan.

3.8 Cara Mengatasi Masalah

1. Memahami permasalahan yang ada yang dapat menyebabkan ketidakefisienan
2. Memberikan pengarahan mengenai prosedur kerja kepada para pegawai sehingga lebih jelas dan dapat dengan mudah dipahami
3. Adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dibidangnya masing-masing agar tercapainya proses kinerja yang lebih baik.